

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis data maka penulis dalam tahapan ini akan memberikan beberapa kesimpulan yang didasarkan kepada hasil analisis data tersebut. Kesimpulan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Dinamika Sosial Politik Pada Perubahan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Jenjang Perguruan Tinggi

a. Era Orde Lama

Perkembangan sosial politik masa orde lama yang mempengaruhi jalannya kebijakan pendidikan nasional adalah sejak 1959, Indonesia berada di bawah gelora Manipol (Manifestasi Politik) USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Manipol-USDEK telah menjadi dewa dalam kehidupan politik Indonesia dan juga dewa dalam bidang kehidupan lainnya, termasuk bidang pendidikan. Sehingga awal mula muncul mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dengan nama Manipol-USDEK yang bertujuan melahirkan manusia yang sosialis. Materi pelajaran didominasi oleh Manipol-USDEK sehingga akar keilmuannya menjadi tidak jelas dan dirancang untuk mendukung penguatan negara patuh kepada pemerintah yang sedang berkuasa serta pendukung setia status quo.

b. Era Orde Baru

Perkembangan sosial politik Orde Baru dengan semangat melaksanakan Pancasila secara murni dan pembangunan ekonomi. Sehingga kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi memasukan mata kuliah Filsafat Pancasila yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa pembangunan yang berjiwa Pancasila. Kehidupan era Orde Baru banyak menuai konflik untuk membasmi antek-antek PKI, sehingga munculah mata kuliah Pendidikan Kewiraan pada tahun 1973/1974 sebagai Pendidikan Bela Negara. Pendidikan

Kewiraan juga memiliki keterkaitan kurikulum dengan Filsafat Pancasila, Pendidikan Moral Pancasila dan cabang Pendidikan lainnya. Materi disusun oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti yang terdiri dari Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, politik dan Strategi Nasional, Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional. Pendidikan Kewiraan dihilangkan setelah Orde Baru runtuh yang dianggap sudah tidak relevan lagi karena pembelajarannya lebih bersifat otoriter.

c. Era Reformasi

Kehidupan sosial politik lebih menonjolkan politik yang demokratis dan perbaikan di dalam hukum dan HAM. Sehingga di perguruan tinggi adanya perubahan mata kuliah Pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan demokrasi. Upaya substitusi mata kuliah pendidikan Kewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) tidak bisa lepas dari konteks ikhtiar kalangan perguruan tinggi untuk menemukan format baru pendidikan demokrasi di Indonesia sekaligus mengantisipasi tuntutan global.

2. Dinamika Makna Pendidikan Kewarganegaraan Pada Jenjang Perguruan Tinggi

Makna dari mata kuliah dari Manipol USDEK dan Pancasila menghasilkan manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia susila yang sosialis dan pelopor dalam membela Manipol USDEK. Mata Kuliah Manipol USDEK dan Pancasila yang mengemban pendidikan ideologi bangsa dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang berisikan materi pelajaran yang sangat ditentukan oleh ideologi dan politik.

Makna Filsafat Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia, yaitu kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Makna Pendidikan Kewiraan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan akan ketangguhan Pancasila sebagai

ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ketangguhan ideologi bangsa harus didukung oleh pengamalannya. Bela negara yang dimaksud adalah sebuah tekad, sikap, semangat, dan tindakan seluruh warga negara secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang harus diberikan kepada peserta didik setingkat perguruan tinggi

Makna Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi era Reformasi lebih sebagai pengembangan kepribadian mahasiswa. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pada saat ini yaitu untuk pemberdayaan warga negara, mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kemajemukan menjunjung tinggi HAM, taat pada hukum dan berwawasan global menuju masyarakat madani

3. Dampak Dinamika Sosial Politik Pada Perubahan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Jenjang Perguruan Tinggi

Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam sistem pendidikan nasional pada era Orde Lama hingga Orde Reformasi. Mata pelajaran PKn ini muncul pertama kali tahun 1957. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang khas. Mata pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Di balik semua itu Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Oleh karena itu nama mata kuliah ini berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan tujuan politik pemerintah agar hasil pendidikan tersebut benar-benar sesuai dan mendukung arah dan perkembangan politik rezim yang berkuasa. Pada orde baru misalnya nama mata kuliah untuk mendidik warganegara ketika itu adalah manusia dan masyarakat baru Indonesia dan pendidikan moral Pancasila.

B. Rekomendasi

1. Kepada Mahasiswa

Dari hasil penelitian bahwa mahasiswa kurang mementingkan mata kuliah PKn karena mata kuliah PKn ini merupakan mata kuliah MKU yang bukan mata kuliah dalam spesialisnya. Oleh karena itu rekomendasi kepada mahasiswa adalah untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti mata kuliah MKU khususnya PKn karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sumber nilai dan pedoman dalam mengantarkan mahasiswa (peserta didik) memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

2. Kepada Dosen

Hasil penelitian bahwa masih ada dosen dalam proses pembelajaran masih menggunakan model yang monoton dan kepada indokrinasi sehingga mahasiswa merasa jenuh dalam proses pembelajaran. Maka dari itu peneliti merekomendasikan bahwa dosen harus memiliki kemampuan untuk merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola pembelajaran untuk dapat terjadinya proses pembelajaran yang tidak monoton.

3. Bagi Komunitas PKn

Rekomendasi bagi komunitas PKn di Indonesia dalam pengembangan kurikulum PKn harus sesuai dengan perkembangan IPTEK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat demokratis yang berdasarkan Pancasila. Serta harus menyamakan persepsi agar tidak ada kepentingan dari segelintir kelompok komunitas PKn.

4. Kepada Pemerintah

Sebagai pengambil kebijakan kurikulum PKn pemerintah harusnya melihat kebutuhan masyarakat bukan memanfaatkan jabatan untuk melakukan indokrinasi dan hegemoni melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan bahwa pengambilan kebijakan pengembangan kurikulum PKn harus

dikembangkan dengan mengacu pada politik negara yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945, tidak boleh mengacu pada kepentingan jangka pendek dari penguasa.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini telah dirancang dan dikajisasakan dengan seksama dan sungguh-sungguh. Namun demikian penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, antara lain sebagai berikut: pertama, sebagaimana dijelaskan di bagian awal penelitian ini fokus pada masalah dinamika PKn pada jenjang perguruan tinggi. Sehingga PKn untuk luar sekolah belum tercakup. Oleh karena itu terbuka kesempatan untuk peneliti selanjutnya mengkaji perubahan kurikulum PKn di Luar sekolah. Kedua, kajian dilakukan tentang kurikulum dan sosial politik. Dengan demikian disarankan peneliti selanjutnya meneliti dalam perspektif lain, seperti metode pengajarnya, kandungan nilai-nilai etika dan demokrasinya dalam rangka memperkaya kajian tentang dinamika PKn di Indonesia